



Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan di Jember

Akmal Thoriqi Triarto¹

Universitas Muhammadiyah Jember

DOI:

<https://doi.org/10.47134/par.v2i3.4215>

*Correspondence: Akmal Thoriqi Triarto

Email: akmalaak29@gmail.com

Received: 07-03-2025

Accepted: 16-04-2025

Published: 28-05-2025



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Jember serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilannya. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan analisis isi, penelitian ini mengkaji data dari berbagai dokumen kebijakan, jurnal ilmiah, serta laporan resmi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan efisiensi administrasi, memperluas akses terhadap layanan publik, memperkuat transparansi anggaran, serta mendorong partisipasi masyarakat melalui platform digital. Dampak positif tersebut antara lain berupa percepatan proses layanan, pengurangan birokrasi, dan peningkatan akuntabilitas pemerintah. Namun demikian, sejumlah tantangan masih menghambat optimalisasi digitalisasi, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi di wilayah terpencil, rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat dan aparatur, regulasi yang belum sepenuhnya adaptif, serta resistensi terhadap perubahan di birokrasi pemerintahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada strategi yang meliputi

peningkatan infrastruktur digital, pelatihan sumber daya manusia, penyusunan kebijakan yang mendukung, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan pendekatan komprehensif tersebut, digitalisasi tata kelola pemerintahan di Jember dapat berjalan secara optimal dan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan di era digital.

Kata Kunci: Tata Kelola, Digitalisasi, Pemerintahan, Transparansi, Inovasi

Abstract: This study aims to analyze the implementation of digitalization in governance in Jember Regency and to identify the supporting and inhibiting factors influencing its success. Using a descriptive qualitative approach through literature review and content analysis, this research examines data from various policy documents, academic journals, and official government reports. The findings indicate that digitalization plays a strategic role in enhancing administrative efficiency, expanding access to public services, strengthening budget transparency, and encouraging citizen participation through digital platforms. These positive impacts include faster service processes, reduced bureaucracy, and improved government accountability. However, several challenges hinder the optimization of digitalization, such as limited technological infrastructure in remote areas, low digital literacy among both citizens and government officials, underdeveloped regulatory frameworks, and resistance to change within the bureaucracy. The study concludes that the success of digital transformation depends heavily on strategies that include improving digital infrastructure, training human resources, developing supportive policies, and fostering collaboration between the government, private sector, and society. Through this comprehensive approach, digital governance in Jember can be optimized to create a more responsive, inclusive, and sustainable government system in the digital era.

Keywords: Governance, Digitalization, Government, Transparency, Innovation

Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan pondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan pembangunan daerah. Tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel sangat dibutuhkan untuk menjawab tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan publik (United Nations Development Programme [UNDP], 2002; Schedler & Schardt, 2007). Di Kabupaten Jember, berbagai persoalan seperti birokrasi yang kompleks, prosedur administrasi yang lambat, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan layanan publik masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, modernisasi tata kelola melalui digitalisasi menjadi langkah strategis guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan (Nurhakim, 2014).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), digitalisasi muncul sebagai solusi inovatif untuk menyelesaikan berbagai masalah pemerintahan. Teknologi digital dapat mempercepat proses administratif, mengurangi intervensi birokrasi, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik (Heeks, 2001; Moon, 2002). Selain meningkatkan efisiensi dan menekan biaya operasional, digitalisasi juga memperkecil peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan, memperkuat transparansi anggaran, dan mendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan (Sandroto, Waruwu, Waruwu, & Zebua, 2024; Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2014).

Namun, implementasi digitalisasi tidak terlepas dari tantangan. Hambatan seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem digital, serta regulasi yang belum adaptif masih menjadi persoalan yang perlu diatasi (Raghupathi & Raghupathi, 2004; Sipayung, 2018). Selain itu, resistensi terhadap perubahan di kalangan birokrasi dan masyarakat juga menjadi penghambat transformasi digital (Van der Meer & Van der Linden, 2018). Oleh karena itu, kebijakan yang komprehensif dan adaptif sangat dibutuhkan agar digitalisasi mampu berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Jember telah menginisiasi berbagai program digitalisasi seperti e-Government, pelayanan administrasi berbasis elektronik, dan sistem informasi kepegawaian sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik (Ashari, 2010). Namun, untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan ini, perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor pendukung dan penghambat transformasi digital di tingkat lokal.

Tinjauan Pustaka

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) telah menjadi topik yang sangat penting dalam kajian kebijakan publik dan manajemen pemerintahan. Menurut UNDP (2002), tata kelola pemerintahan yang baik mencakup delapan elemen, yaitu partisipasi, aturan hukum, transparansi, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis, serta responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks digitalisasi pemerintahan, elemen-elemen ini dapat diperkuat melalui

teknologi yang memungkinkan akses informasi yang lebih mudah, meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, serta mempermudah masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan (Hidayat, A., & Irvanda, M., 2022).

Konsep digitalisasi pemerintahan atau e-Government merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pelayanan publik (Heeks, 2001). E-Government telah diterapkan di berbagai negara dengan tujuan untuk mengubah cara pemerintah bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat. Menurut Layne dan Lee (2001), digitalisasi pemerintahan terdiri dari beberapa tahap, mulai dari informasi berbasis web (informing), interaksi dua arah (interacting), transaksi digital (transactional), hingga pelayanan berbasis internet yang sepenuhnya terintegrasi (transforming) (Nurhakim, M. R. S., 2014).

Digitalisasi juga memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Moon (2002), yang menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam pemerintahan memungkinkan pelayanan publik menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Penggunaan aplikasi digital untuk mengelola data pelayanan publik juga dapat mengurangi potensi kesalahan manusia dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan data (Sandroto, W., Waruwu, S., Waruwu, E., & Zebua, E., 2024).

Namun, meskipun potensi digitalisasi sangat besar, implementasinya tidaklah tanpa hambatan. Raghupathi dan Raghupathi (2004) menyatakan bahwa beberapa tantangan utama dalam implementasi e-Government meliputi masalah infrastruktur, regulasi yang ketinggalan zaman, kurangnya keahlian di kalangan pegawai pemerintah, serta adanya resistensi terhadap perubahan dalam birokrasi. Tanpa adanya dukungan infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia yang terlatih, digitalisasi tidak dapat berjalan dengan optimal.

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi pemerintahan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, masalah kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital masih perlu diatasi. Menurut Sarker dan Wells (2003), kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital sangat penting dalam mendorong partisipasi aktif dalam pemerintahan elektronik. Oleh karena itu, penerapan digitalisasi dalam pemerintahan memerlukan pendekatan yang holistik, termasuk upaya untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan keterampilan pegawai, serta memastikan kebijakan dan regulasi yang mendukung.

Secara keseluruhan, digitalisasi tata kelola pemerintahan dapat membawa berbagai manfaat, namun juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang harus diatasi untuk memastikan keberhasilan implementasinya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan implementasinya di Jember.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis tata kelola dan digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang terjadi dalam implementasi digitalisasi pemerintahan, serta untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan tantangan dalam proses transformasi digital tersebut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi tata kelola pemerintahan yang tengah berlangsung seiring dengan digitalisasi yang diterapkan di Indonesia. Deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran tentang proses, hasil, dan hambatan dalam implementasi digitalisasi pemerintahan berdasarkan kajian literatur dan analisis kebijakan yang ada.

2. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah studi literatur yang mencakup buku, jurnal, laporan penelitian, dokumen kebijakan, serta artikel-artikel yang relevan mengenai tata kelola pemerintahan dan digitalisasi. Data sekunder juga diperoleh dari berbagai sumber resmi pemerintah, laporan tahunan institusi yang berhubungan dengan digitalisasi pemerintahan, dan publikasi yang terkait dengan implementasi e- Government di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), yang melibatkan pencarian, pengumpulan, dan analisis berbagai referensi yang relevan. Referensi tersebut akan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan, serta tantangan dan faktor-faktor pendukung keberhasilannya.

4. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) untuk menggali tema-tema utama yang terkait dengan digitalisasi pemerintahan. Analisis ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses digitalisasi serta menganalisis dampak digitalisasi terhadap tata kelola pemerintahan. Dalam analisis ini, peneliti akan menggunakan pendekatan induktif untuk menarik kesimpulan dari data yang ada.

5. Validitas Data

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai referensi dari sumber yang berbeda untuk memastikan konsistensi temuan. Selain itu, peneliti juga akan memperhatikan keakuratan dan kredibilitas sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.

6. Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya terbatas pada kajian literatur yang terkait dengan digitalisasi pemerintahan di Indonesia dan tidak akan melibatkan penelitian lapangan atau pengumpulan data primer melalui wawancara atau survei. Fokus utama penelitian ini adalah pada kebijakan dan implementasi e-Government dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, serta analisis tantangan dan faktor-faktor keberhasilannya.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kontribusinya dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan di Indonesia.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bagian ini, hasil penelitian mengenai tata kelola dan digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan di Jember akan dibahas secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengimplementasikan digitalisasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan analisis studi literatur yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Namun, tantangan signifikan dalam implementasi digitalisasi masih perlu diatasi agar potensi tersebut dapat terealisasi secara optimal.

Dampak Digitalisasi terhadap Tata Kelola Pemerintahan

Digitalisasi pemerintahan membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa dampak positif yang dapat dirasakan, antara lain:

a. Peningkatan Efisiensi dan Pengurangan Birokrasi

Salah satu dampak terbesar dari digitalisasi adalah pengurangan birokrasi yang berbelit-belit. Dengan adanya sistem digital, proses administratif yang sebelumnya memerlukan banyak waktu dan dokumen fisik kini dapat dilakukan secara otomatis dan lebih cepat. Proses seperti pendaftaran layanan publik, pengajuan izin, pembayaran pajak, dan pengurusan dokumen dapat dilakukan secara online. Hal ini tidak hanya mempercepat pelayanan kepada masyarakat tetapi juga mengurangi peluang terjadinya kesalahan manusia dalam proses administrasi.

Salah satu contoh implementasi digitalisasi yang berhasil adalah Sistem Administrasi Badan Usaha Milik Negara (SABU), yang memungkinkan pengurusan dana daerah secara langsung. Dengan adanya transparansi ini, masyarakat dapat lebih mudah mengawasi kinerja pemerintah serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Selain itu, digitalisasi juga memudahkan pelaporan akuntabilitas kinerja

pemerintah. Melalui platform digital, laporan kinerja dan penggunaan anggaran dapat diakses secara langsung oleh berbagai pihak yang berkepentingan, seperti lembaga pengawas dan masyarakat. Hal ini memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

b. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Digitalisasi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Dengan adanya platform digital seperti aplikasi pengaduan masyarakat dan forum diskusi publik, masyarakat dapat dengan mudah memberikan masukan, mengajukan keluhan, atau berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Sebagai contoh, aplikasi Laporan! yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan masalah yang mereka temui dalam pelayanan publik telah memberikan saluran komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Tantangan dalam Implementasi Digitalisasi di Jember

Meskipun digitalisasi menawarkan banyak keuntungan, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang menghambat keberhasilan implementasinya di Jember. Beberapa tantangan utama yang ditemukan antara lain:

c. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi digitalisasi pemerintahan adalah keterbatasan infrastruktur teknologi yang memadai. Beberapa daerah di Jember, terutama daerah terpencil dan pedesaan, masih kekurangan akses internet yang stabil dan cepat. Hal ini menghambat masyarakat di daerah tersebut untuk mengakses layanan digital yang disediakan oleh pemerintah. Selain itu, keterbatasan perangkat keras dan perangkat lunak di beberapa instansi pemerintah juga menghambat keberlanjutan dan efektivitas sistem digital yang telah diterapkan.

d. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan sistem digital juga menjadi tantangan penting. Banyak aparat pemerintah yang masih kurang terampil dalam menggunakan teknologi informasi dan sistem digital. Meskipun ada program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pegawai pemerintah, namun prosesnya berjalan lambat, dan masih banyak pegawai yang belum terbiasa dengan sistem digital yang ada. Tanpa SDM yang kompeten dalam mengelola teknologi digital, digitalisasi pemerintahan tidak akan dapat berjalan dengan optimal.

e. Regulasi yang Belum Memadai

Selain masalah infrastruktur dan SDM, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung digitalisasi pemerintahan juga menjadi hambatan. Beberapa kebijakan pemerintah masih berbasis pada prosedur manual dan konvensional,

yang menghambat proses digitalisasi. Meskipun telah ada sejumlah peraturan yang mendukung penggunaan teknologi dalam pemerintahan, namun implementasinya sering kali terkendala oleh tumpang tindihnya peraturan yang berlaku atau kurangnya pemahaman tentang kebijakan digital di tingkat pemerintah daerah. Resistensi terhadap Perubahan Birokrasi pemerintah cenderung memiliki struktur yang sangat hierarkis dan prosedural. Hal ini sering kali menyebabkan resistensi terhadap perubahan, terutama jika perubahan tersebut melibatkan teknologi baru. Beberapa pegawai pemerintahan mungkin merasa lebih nyaman dengan cara-cara lama yang telah mereka lakukan, dan mereka tidak terbiasa dengan sistem digital yang membutuhkan keterampilan baru. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengubah budaya kerja di birokrasi pemerintahan agar lebih terbuka terhadap digitalisasi.

Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Digitalisasi

Dalam penelitian ini, ditemukan beberapa faktor yang dapat mendukung keberhasilan digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan di Jember, yaitu:

a. Dukungan Pemerintah Pusat

Dukungan dari pemerintah pusat sangat penting dalam mengimplementasikan digitalisasi di seluruh tingkat pemerintahan. Pemerintah pusat perlu memberikan regulasi yang jelas dan mendukung penggunaan teknologi digital, serta memastikan bahwa infrastruktur yang dibutuhkan tersedia secara merata di seluruh wilayah. Program-program seperti Smart City dan e-Government yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia diharapkan dapat mendorong percepatan digitalisasi di daerah seperti Jember.

b. Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga sangat penting dalam mendorong digitalisasi. Pemerintah perlu bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk menyediakan infrastruktur dan perangkat yang diperlukan, serta dengan masyarakat untuk mengedukasi mereka mengenai manfaat dan penggunaan sistem digital. Kolaborasi ini dapat menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan digitalisasi di Jember.

c. Peningkatan Kualitas SDM

Untuk memastikan digitalisasi berjalan dengan baik, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting. Pelatihan dan pendidikan mengenai teknologi informasi dan sistem digital harus menjadi bagian integral dari program pengembangan pegawai pemerintah. Selain itu, pendidikan mengenai literasi digital juga perlu diperkenalkan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang layanan publik berbasis teknologi. Digitalisasi tata kelola pemerintahan di Jember

menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Namun, tantangan yang terkait dengan infrastruktur, kualitas SDM, regulasi, dan resistensi terhadap perubahan perlu diatasi agar digitalisasi dapat berjalan dengan optimal. Dukungan dari pemerintah pusat, kolaborasi dengan sektor swasta, serta peningkatan kualitas SDM merupakan faktor penting yang dapat mendukung keberhasilan implementasi digitalisasi pemerintahan. Melalui langkah-langkah ini, digitalisasi dapat menjadi solusi yang efektif dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Jember.

Kesimpulan

Digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan di Jember memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi teknologi digital dapat mempercepat proses administrasi, mengurangi birokrasi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa berbagai tantangan masih harus diatasi, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, serta resistensi terhadap perubahan di lingkungan birokrasi. Faktor-faktor pendukung seperti dukungan pemerintah pusat, kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi elemen kunci dalam keberhasilan digitalisasi pemerintahan. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, digitalisasi dapat memberikan manfaat nyata bagi tata kelola pemerintahan di Jember dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

Saran

1. Peningkatan Infrastruktur Teknologi Pemerintah daerah Jember perlu berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur teknologi yang lebih baik, termasuk peningkatan akses internet di daerah terpencil serta modernisasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam administrasi pemerintahan. Peningkatan Kapasitas SDM Program pelatihan dan pendidikan digital harus lebih ditingkatkan bagi aparatur pemerintahan agar mereka dapat mengelola sistem digital dengan lebih baik. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan edukasi mengenai literasi digital agar mereka dapat memanfaatkan layanan digital dengan optimal.
2. Penyempurnaan Regulasi Regulasi terkait digitalisasi pemerintahan harus lebih diperjelas dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak menghambat implementasi digitalisasi dan dapat mendukung proses administrasi yang lebih efisien.
3. Mendorong Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Masyarakat Digitalisasi

tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus aktif berkolaborasi dengan sektor swasta dalam pengadaan teknologi dan dengan masyarakat dalam proses pemanfaatan layanan digital.

4. Perubahan Budaya Kerja di Birokrasi Untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan, diperlukan upaya dalam menciptakan budaya kerja yang lebih adaptif terhadap teknologi. Hal ini bisa dilakukan dengan sosialisasi, pelatihan, serta insentif bagi pegawai yang mampu mengadopsi sistem digital dengan baik.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, digitalisasi tata kelola pemerintahan di Jember dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta meningkatkan efektivitas pemerintahan secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Administration in the 21st Century*. Routledge., J., & Lewis, J. (2003). *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers*. SAGE Publications.
- Afrilia, U. A., Muharam, R. S., & Nurlia, E. (2024, November). Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan: Mewujudkan Society 5.0 yang Inklusif. In Seminar Nasional Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Vol. 1, pp. 524-533).
- Ashari, E. T. (2010). Reformasi Pengelolaan SDM Aparatur, Prasyarat Tata Kelola Birokrasi
- Bhatnagar, S. (2004). *E-Government: From Vision to Implementation*. SAGE Publications.
- Duflo, E., & Banerjee, A. (2011). *Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty*. PublicAffairs.
- Global Perspective*. Journal of Global Governance, 22(2), 99-115.
- Hidayat, A., & Irvanda, M. (2022). Optimalisasi penyusunan dan pembuatan laporan untuk mewujudkan good governance. Jurnal Ilmiah Hospitality, 11(1), 281-290.
- Houghton, J., & Sheehan, P. (2000). *A Primer on the Knowledge Economy*. Centre for Strategic Economic Studies, Victoria University.
- Kettunen, P., & Kallio, J. (2019). *Digitalization in Public Administration: Key Challenges and Trends*. Journal of Public Administration.
- Löffler, E., & Bovens, M. (2010). *Public Management Reforms: A Global Perspective*. McKinsey & Company.
- McKinsey & Company. (2017). *Unlocking the Potential of Digital Government*.
- Moffitt, R. (2018). *E-Government and the Transformation of Public Services in the EU*. Routledge.
- Nurhakim, M. R. S. (2014). Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern. Jurnal Ilmu Administrasi, 11(3), 403-422.
- O'Toole, L. J. (2014). *Public Management: Policy, Processes, and People*. Routledge.
- Parker, D., & Veenstra, M. (2013). *Digital Governance: Technology and Public*
- OECD. (2014). *OECD Public Governance Reviews: The State of the State in the Digital Era*.

- OECD Publishing.
- O'Reilly, T. (2010). *Government as a Platform*. Innovations: Technology, Governance, Globalization, 5(1), 87-96. Routledge.
- Sandroto, W., Waruwu, S., Waruwu, E., & Zebua, E. (2024). Evaluasi dampak penerapan sistem aplikasi Eraterang dalam peningkatan pelayanan publik di Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli. *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 37-46.
- Schedler, K., & Schardt, S. (2007). *The Role of E-Government in Promoting Transparency and Good Governance*. *Public Administration Review*, 67(1), 67-79.
- Shih, P., & Kumar, A. (2011). *E-Government for the 21st Century: E-Governance Models for the Digital Age*. Springer.
- Sipayung, S. (2018). *Analisis Implementasi E-Government di Indonesia: Studi Kasus dan Perspektif*. *Jurnal Pemerintahan*, 5(2), 34-52.
- Teixeira, A., & Costa, A. (2015). *Digital Transformation in Public Administration: The Case of Portugal*. *Public Administration Review*, 65(6), 23-45.
- United Nations. (2016). *E-Government Survey 2016: E-Government in Support of Sustainable Development*. United Nations Department of Economic and Social Affairs.
- Van der Meer, F., & Van der Linden, R. (2018). *Digital Government and the Impact on Public Policy*. *Journal of Policy Analysis and Management*, 37(3), 531-548.
- Willoughby, K. (2011). *E-Government and Public Sector Reform*. Palgrave Macmillan.
- World Bank. (2016). *Digital Government and the Role of Technology in Public Services*. World Bank Group.
- World Economic Forum. (2018). *Shaping the Future of the Internet Economy: Digital Transformation and Public Governance*. World Economic Forum.
- Yang Baik. *Jurnal Borneo Administrator*, 6(2).
- Yu, H. (2014). *Smart Cities and E-Government: The New Digital Frontier*. Springer.
- Zall, D. (2017). *E-Governance: Theoretical and Practical Perspectives*. Routledge.
- Zeng, L., & Xue, M. (2016). *The Role of Technology in Transforming Government: A*
- Zwitter, A., & Boersma, K. (2016). *Technology and Governance: Digital Transformation and the Future of Government Services*. Palgrave Macmillan.